



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Qanun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017 perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pandayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Negara Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 239);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 239);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 244);

18. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014 tentang Penetapan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bertujuan;
- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal
BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

1. Pemerintah Kabupaten : Aceh Singkil.
2. Kewenangan : Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
3. Indikator Kinerja Utama :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2
1	IPM
2	Tingkat daya tampung pendidikan PAUD
3	Angka Partisipasi Murni SD/MI
4	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs
5	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK
6	Pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan
7	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
8	Cakupan kelurahan/desa Uci
9	Angka balitapenderita giji buruk
10	Tingkat derajat desentralisasi (PAD/Penerimaan Daerah)
11	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah
12	Hasil Evaluasi SAKIP
13	Peringkat Prestasi kinerja Berdasarkan evaluasi LPPD
14	PersentasePenduduk yang memiliki E-KTP
15	Jumlah Prestasi dalam bidang olahraga
16	Tingkat produksi komoditi : Padi, Jagung, Semangka, Cabe
17	Tingkat Produksi Daging Ternak per tahun
18	Persentase peningkatan luas lahan hutan
19	Tingkat produksi komoditi Sawit
20	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Laut

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2
21	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Air Tawar
22	Jumlah Koperasi yang aktif dan Sehat
23	Tingkat Pertumbuhan UKM
24	Persentase Panjang Jalan yang berkualitas baik
25	Cakupan Rumah tangga yang mengakses air bersih
26	Cakupan ketersediaan rumah layak huni
27	Rata-rata lama penanganan bencana setelah kejadian bencana
28	Jumlah objek wisata
29	Jumlah wisatawan ke objek wisata : a. Wisatawan dalam Negeri b. Wisatawan luar Negeri
30	Tingkat pengangguran
31	Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam yang ditindaklanjuti/diselesaikan (Kali)

BUPATI ACEH SINGKIL

SAFRIADI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMORTAHUN 2015
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	RUMUS PERHTUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG-JAWAB
1	2	3	4	5	5
1	Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia.	IPM	$IPM = 1/3 [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ $X_{(1)} : \text{Indeks Harapan Hidup}$ $X_{(2)} : \text{Indeks Pendidikan}$ $X_{(3)} : \text{Indeks Standar Hidup}$	SPM	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	Meningkatnya sinergitas dan terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan daerah	Tingkat Keselarasan RKPD dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Program RKPK yang selaras dengan RPJMD pada tahun } n}{\text{jumlah Program RKPK pada tahun } n} \times 100\%$	RPJMD	
		Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Renstra SKPK yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Renstra SKPK}} \times 100\%$ Keterangan : Rensra SKPK yang selaras dengan RPJMD adalah seluruh Sasaran Strategis dan Programnya selaras dengan RPJMD	RPJMD	
		Tingkat Keselarasan Renja SKPD dengan RKPD	$\frac{\text{Jumlah Renja SKPK yang selaras dengan RKPK}}{\text{Jumlah Renja SKPK}} \times 100\%$	RPJMD	
3	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan.	Tingkat daya tampung pendidikan PAUD	$\frac{\text{Jumlah siswa yang tertampung pada PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia 4-6 tahun}} \times 100\%$	SPM	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Siswa SD/MI usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$	SPM	
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah Siswa SMPMTs usia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	SPM	
		Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	$\frac{\text{Jumlah Siswa SMA/MA/SMK usia 16-18 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 16-18 tahun}} \times 100\%$	SPM	

4	Meningkatnya Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan=	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jml seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama}} \times 100\%$	SPM	DINAS KESEHATAN
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani=	$\frac{\text{Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada*}} \times 100\%$	SPM	
		Cakupan kelurahan/desa Uci	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) =	$\frac{\text{Jumlah desa /kelurahan UCI}}{\text{Jumlah seluruh desa/kelurahan}} \times 100\%$	SPM	DINAS KESEHATAN
		Angka Balita penderita gizi buruk	Angka Penderita Gizi Buruk=	$\frac{\text{Jumlah Balita Penderita Gizi Buruk}}{\text{Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yg sama}} \times 100\%$	SPM	DINAS KESEHATAN
5	Meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah yang transparan dan akuntabel	Tingkat derajat desentralisasi (PAD/Penerimaan Daerah)	PAD/Penerimaan Daerah*100%		Renstra SKPD	DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
		Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	Hasil evaluasi BPK		Renstra SKPD	

6	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	Hasil evaluasi SAKIP	$\frac{\text{Nilai capaian sistem AKIP tahun lalu}}{\text{Nilai capaian AKIP tahun berjalan}} \times 100\%$	Renstra SKPD	SEKRETARIAT DAERAH
		Peringkat Prestasi kinerja Berdasarkan evaluasi LPPD	Tingkat prestasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi inspektorat Aceh/BPKP Aceh	Renstra SKPD	
7	Meningkatnya Legislasi Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Legislasi Peraturan Perundang-Undangan	$\frac{\text{Jumlah legislasi Peraturan Perundang-undangan}}{\text{Jumlah Program Legislasi Peraturan Perundang-undangan (PROLEGDA)}} \times 100\%$		
		Persentase SKPK yang menyajikan laporan keuangan sesuai SAP	$\frac{\text{Jumlah SKPK dgn. LK sesuai SAP}}{\text{Jumlah SKPK}} \times 100\%$	Renstra SKPD	INSPEKTORAT
		Persentase Rekomendasi Temuan BPK-RI dan APIP yang selesai di tindak lanjuti.	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Temuan BPK dan APIP yang selesai ditindak Lanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$	Renstra SKPD	INSPEKTORAT
8	Meningkatnya pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki E-KTP	$\frac{\sum \text{KTP elek. yg diterbitkan}}{\sum \text{penddk. wajib KTP elekt.}} \times 100\%$	SPM	DISDUK & CAPIL
9	Meningkatnya budaya olahraga dalam masyarakat	Jumlah Prestasi dalam bidang olahraga	(Jumlah prestasi dari beberapa event olah raga tingkat daerah maupun tingkat nasional yang diikuti; kriteria prestasi adalah peringkat 3 keatas dalam event tersebut)	SPM	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
8	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	Tingkat produksi komoditi : Padi, Jagung, Semangka, Cabe	Jumlah hasil produksi, komoditi Padi, Jagung per tahun	SPM	Pertanian
9	. Meningkatkan produktivitas Sektor Peternakan dalam rangka pencapaian swasembada daging	Tingkat Produksi Daging Ternak per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi daging tahun lalu}}{\text{Jumlah produksi daging tahun berjalan}} \times 100\%$	Renstra SKPD	Peternakan
10	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Persentase peningkatan luas lahan hutan	$\frac{\text{Jumlah hutan dan penghijauan lahan tahun}}{\text{Jumlah reboisasi hutan dan penghijauan lahan tahun berjalan}} \times 100\%$	Renstra SKPD	Kehutanan
11	Meningkatnya produksi Perkebunan	Tingkat produksi komoditi Sawit	Hasil produksi sawit per ha / tahun	Renstra SKPD	Perkebunan
12	Meningkatnya produksi Perikanan	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Laut	Jumlah hasil penangkapan ikan laut /tahun	Renstra SKPD	Perikanan
		Jumlah Hasil Produksi Perikanan Air Tawar	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Air Tawar /Tahun	Renstra SKPD	
13	Meningkatnya pembinaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang aktif dan Sehat	Jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	Renstra SKPD	Dinas Perindustrian, Perdagangan,

14	Meningkatnya pembinaan UKM	Tingkat Pertumbuhan UKM	Jumlah UKM tahun ini/Jumlah UKM tahun lalu	Renstra SKPD	Koperasi dan UKM
15	Penguatan Ekonomi Base Daerah bersinergi dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat terakomodirnya pengguna jasa transportasi laut pada lintas dalam Kabupaten.	Persentase Panjang Jalan yang berkualitas baik	Kecepatan = $\frac{\sum \text{Luas Jalan yang bagus}}{\sum \text{Ruas jalan yang ditempuh keseluruhan}}$	SPM	Dinas Pekerjaan Umum
		Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah Angkutan Darat}}{\text{Jumlah Penumpang Angkutan}} \times 100 \%$	SPM	Dinas Perhubungan dan Informatika
		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	$\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Angkutan}} \times 100 \%$	SPM	Dinas Perhubungan dan Informatika
16	Meningkatnya Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan Rumah tangga yang mengakses air bersih.	$\text{SPM Air Minum} = \left[\frac{\sum \text{Masyarakat yang memiliki Akses Air Minum Yang Aman}}{\sum \text{Jumlah Penduduk Kabupaten Kota Pada Akhir Tahun}} \right] \text{ Pencapaian SPM}$	SPM	Dinas Pekerjaan Umum
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\sum \text{Rumah layak huni}}{\sum \text{Rumah}} \times 100 \%$	SPM	Dinas Pekerjaan Umum
17	Pengurangan resiko bencana	Rata rata lama penanganan bencana setelah kejadian bencana.	$\frac{\text{Penanganan Bencana setelah kejadian bencana}}{\text{Jumlah bencana per tahun}} \times 100 \%$	Renstra SKPD	Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah
18	Meningkatnya sumber daya sektor industri dan pariwisata	Jumlah objek wisata	Objek wisata yang telah dikelola baik oleh pemda/Jumlah keseluruhan objek wisata	SPM	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		Jumlah wisatawan ke objek wisata : a. Wisatawan dalam Negeri b. Wisatawan luar Negeri	Jumlah kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri per tahun	SPM	
19	Meningkatnya Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan,	Tingkat pengangguran	$\frac{\sum \text{pencari kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{pencari kerja yang terdaftar}} \times 100$	SPM	DINAS SOSIAL, TENAG KERJA DAN TRANSMIGRASI

20	Meningkatnya Jumlah Kelompok Masyarakat yang ber KB dan ber kategori keluarga sejahtera	Indeks Keluarga Sejahtera	$\frac{\sum \text{Jumlah Perempuan Produktif}}{\sum \text{Jumlah Perempuan}} \times 100\%$	SPM	BPP & KS
		Prevalensi peserta KB aktif	$\frac{\sum \text{Peserta KB Aktif}}{\sum \text{Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	SPM	BPP & KS
21	Terwujudnya pelayanan KIE KB - KS bagi Masyarakat dan	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 Tahun	$\frac{\sum \text{PUS yang istrinya} < 20 \text{ Tahun}}{\sum \text{PUS yang istrinya } 15 - 49 \text{ Tahun}} \times 100\%$	SPM	BPP & KS
22	Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa	Persentase Kampung Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Kampung yg mandiri}}{\text{Jumlah seluruh Kampung}} \times 100\%$	RENSTRA SKPD	BPM
23		Rasio BUMG per Gampong	$\frac{\text{Jumlah BUMG yang dibentuk}}{\text{Jumlah seluruh Kampung}} \times 100\%$	RENSTRA SKPD	BPM
24	Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap ketaatan pengelolaan limbah cair, emisi/polusi udara serta limbah padat dan limbah B3 oleh industri	Persentase industri yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	$\frac{\sum \text{Usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air}}{\sum \text{Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi}} \times 100$	SPM	BAPEDALDA
		Jumlah industri yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara.	$\frac{\sum \text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah}}{\sum \text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah di inventarisasi}} \times 100$	SPM	BAPEDALDA
		Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan	$\frac{\sum \text{Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan}}{\sum \text{Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa}} \times 100$	SPM	BAPEDALDA
25	Peningkatan kemampuan dan ketrampilan Tenaga Penyuluh	Persentase penyuluh yang tersertifikasi	$\sum \text{Penyuluh fungsional} - \sum \text{Penyuluh yang belum tersertifikasi}$	SPM	BPPKP
26	Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	$\frac{\sum \text{Daerah Terkena Rawan Pangan atau termasuk rawan Pangan yang sudah atau sedang diatangani}}{\text{Jumlah Daerah Terkena atau Termasuk Rawan Pangan}} \times 100\%$	SPM	BPPKP

27	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	$\frac{\sum \text{Cadangan Pangan Kabupaten}}{100 \text{ Ton}} \times 100\%$	SPM	BPPKP
		Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	$\frac{\text{Persentase Ketersediaan Energi/Kapita/Hari} + \text{Persentase Ketersediaan Protein/Kapita/Hati}}{2}$	SPM	BPPKP
28	Meningkatkan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	$\frac{\sum \text{pelanggaranperda/perkadaydiselesaikan}}{\sum \text{pelanggaranperda/perkadaygdilaporkan/ dipantau}} \times 100 \%$	SPM	SATPOL PP & WH
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	$\frac{\sum \text{kelomp. patrolidikalikan 3 patrolidlmsehari}}{\sum \text{kelompokkecamatan (jumlahkecamatan)}}$	SPM	SATPOL PP & WH
		Cakupan rasio petugas Linmas	$\frac{\sum \text{satuanLinmas}}{\sum \text{RT/Dusun}} \times 100 \%$	SPM	SATPOL PP & WH
29	Meningkatnya penerapan Syariat Islam yang kaffah dalam kehidupan masyarakat	Persentase Penegakan Syariat Islam yang ditindaklanjuti/diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Penindakan kasus pelanggaran syariat islam}}{\text{JumlahKasusPelanggaranSyari'at Islam}} \times 100 \%$	RENSTRA SKPD	Dinas Syari'at Islam

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

